

**MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA  
DALAM RANGKA AKSELERASI PEREKONOMIAN DAN  
SEKTOR PARIWISATA DI SULAWESI UTARA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR**

*PEOPLE CENTERED ECONOMIC DEVELOPING IN INDONESIAN EAST REGION IN THE CONNECTION  
OF ECONOMIC AND TOURISM SECTOR ACCELERATION IN NORTH SULAWESI:  
A LITERATURE STUDY*

Oleh:  
**Wensy I. Rompas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:  
[wensyrompas@unsrat.ac.id](mailto:wensyrompas@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Kawasan Timur Indonesia yang mengalami ketimpangan perekonomian dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dimana pembangunan ekonomi di wilayah ini masih kurang dan bahkan terbelakang walaupun wilayah ini memiliki kekayaan alam yang besar dan wilayah yang luas namun potensinya belum dikembangkan secara maksimal serta belum memanfaatkan potensi khususnya rakyat yang berdiam, serta merupakan rakyat adalah penduduk asli di wilayah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lewat pemikiran dan telaah literatur tentang: Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara terutama dalam akselerasi perkembangan sektor perekonomian dan sektor pariwisata di daerah dan kawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kajian literatur. Penelitian ini untuk mengkaji suatu fenomena dengan mengandalkan studi literatur atau pustaka yang ada seperti artikel ilmiah, buku, dokumen dan lainnya. Selanjutnya data dianalisis dengan mencari benang merah tentang keterkaitan teori dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengembangan ekonomi kerakyatan di Kawasan Timur Indonesia serta ekonomi kerakyatan dapat berperan dalam mengakselerasi perkembangan perekonomian dan juga pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.

**Kata Kunci :** ekonomi kerakyatan, kawasan timur Indonesia, akselerasi, perekonomian, pariwisata, Sulawesi Utara

**Abstract:** Eastern Indonesia is experiencing economic inequality compared to the Western Region of Indonesia where economic development in this region is still lacking and even underdeveloped even though this region has a large natural wealth and vast territory but its potential has not been maximally developed and has not utilized the potential, especially the people who dwell, and is a people who are indigenous people in this region. The purpose of this study had to examine through the thought and review of the literature on: The development of popular economy in Eastern Indonesia, especially in North Sulawesi Province, especially in accelerating the development of the economic sector and the tourism sector in this region. The type of research used is descriptive literature review. This study is to examine a phenomenon by relying on existing literature or literature studies such as scientific articles, books, documents and others. Furthermore, the data was analyzed by searching the common thread about the relationship between the theory and the topics discussed. The results of the study show the importance of the development of people centered economy in Eastern Indonesia and the people centered economy can play a role in accelerating economic and tourism development in North Sulawesi Province.

**Keywords:** people centered economy, Indonesian east region, acceleration, economy, tourism, North Sulawesi

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Ekonomi kerakyatan merupakan ide bidang ekonomi yang dikembangkan di tahun 1930-an oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta pendiri Republik Indonesia dan juga presiden dan wakil presiden pertama negara Indonesia ini. Sistem ekonomi ini merupakan lawan dari sistem ekonomi monopoli. Mohammad Hatta menggunakan istilah *perekonomian ra'jat* (perekonomian rakyat) dan *ekonomi ra'jat* (ekonomi rakyat). Hal ini merujuk pada pemahaman akar rumput ekonomi tentang ekonomi yang berbasis pada rakyat atau *people based economy* dan ekonomi yang berpusat pada kepentingan rakyat atau *people centered economy* (Sukarno, 1964).

Ekonomi kerakyatan ini penting terkait juga dengan peningkatan perekonomian masyarakat pribumi atau bumiputera atau masyarakat asli di suatu daerah atau wilayah khususnya di Indonesia. Hal ini juga menjadi fokus dan keprihatinan dari para pemimpin dunia saat ini seperti misalnya Dr. Mahathir Muhammad merupakan Perdana Menteri Malaysia yang berusaha memfokuskan pada pengembangan ekonomi yang berpusat kepada kepentingan rakyat khususnya rakyat di suatu negara atau di negara yang dipimpinnya seperti permisalan tadi yaitu di Malaysia.

Pentingnya mengangkat taraf perekonomian rakyat dan masyarakat suatu negara dan daerah untuk mengatasi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta membawa suatu negara kepada negara yang berbasis kesejahteraan dimana hal ini juga yang menjadi cita-cita para pendiri Indonesia khususnya tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..."

Kawasan Timur Indonesia yang mengalami ketimpangan perekonomian dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dimana pembangunan ekonomi di wilayah ini masih kurang dan bahkan terbelakang walaupun wilayah ini memiliki kekayaan alam yang besar dan wilayah yang luas namun potensinya belum dikembangkan secara maksimal serta belum memanfaatkan potensi khususnya rakyat yang berdiam, serta merupakan rakyat adalah penduduk asli di wilayah ini. Ketertinggalan ekonomi ini harus dicarikan jalan keluar yang membuat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat khususnya rakyat yang berasal dari wilayah ini turut menikmati pertumbuhan perekonomian Indonesia bahkan menjadi pelaku utama dari perekonomian di Kawasan Timur Indonesia ini. Untuk itu ekonomi kerakyatan dapat menjadi salah satu solusi dari beragam permasalahan di wilayah ini.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lewat pemikiran dan telaah literatur tentang: Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara terutama dalam akselerasi perkembangan sektor perekonomian dan sektor pariwisata di daerah dan kawasan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Sistem Ekonomi adalah sistem sosial atau kemasyarakatan yang dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial yang untuk mencapai kemakmuran. Terkandung unsur-unsur (Farida, 2011): (1) Tujuan bersama dengan harapan yang melahirkan kebiasaan, tradisi, kaidah, aturan yang melembaga; (2) Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut dan menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu; (3) Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban. Gregory Grossman (Bhudianto, 2012) mengatakan bahwa yang dimaksud sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur – unsur terdiri atas unit – unit dan agen – agen ekonomi serta lembaga – lembaga ( institusi ) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Dumairy (2005) mengatakan bahwa suatu Sistem Ekonomi tidaklah berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan: (1) falsafah; (2) pandangan hidup masyarakat; (3) pola hidup masyarakat; (4) idiologi.

Perbedaan sistem ekonomi terjadi lebih disebabkan karena perbedaan nilai-nilai hidup antara suatu kelompok masyarakat atau negara. Faktor – faktor yang mempengaruhi pemakaian suatu sistem ekonomi antara

lain (Bhudianto, 2012): (1) Faktor Intern, meliputi: (lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga ide, kebijakan pemerintah) (2) Faktor Ekstern, meliputi : (keadaan politik, falsafah negara, hukum yang berlaku, politik luar negeri).

### Bentuk-Bentuk Sistem Ekonomi

Di dunia terdapat bermacam-macam sistem ekonomi antara lain (Bhudianto, 2012): (1) Dilihat dari mekanisme koordinasinya, sistem ekonomi dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: sistem tradisi, sistem komando, dan sistem pasar; (2) Dilihat berdasarkan penekanan hak kepemilikan yang berlakunya, terdapat sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis.

Secara umum Sistem Ekonomi dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu: Sistem Ekonomi Liberalis-kapitalistik, Sistem Ekonomi sosialis-komunistik dan Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*). Berikut penjelasan dari sistem-sistem ekonomi tersebut (Subandi, 2011):

#### 1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis.

Sistem Ekonomi Liberalis-Kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atas sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perseorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetensi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Prinsip keadilan yang dianut adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Campur tangan pemerintah sangat minim. Sistem ini menyandarkan diri pada mekanisme pasar, berdasarkan prinsip *Laissez Faire* (persaingan bebas) dan menyakini kemampuan (*the invisible hand*) dalam menuju efisiensi ekonomi.

#### 2. Sistem Ekonomi Sosialis-komunistik

Dalam Sistem Ekonomi sosialis komunistik adalah sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Prinsip keadilan yang dianut ialah setiap orang menerima imbalan yang sama. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Semua alat produksi adalah milik bersama/negara. Sistem ekonomi dikendalikan melalui perencanaan terpusat.

#### 3. Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*)

Sistem Ekonomi campuran pada umumnya diterapkan pada negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Dalam praktiknya Sistem Ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia mengandung unsur-unsur Kapitalisme dan Sistem Sosialisisme dalam pengorganisasian sistem ekonominya. Untuk melihat sistem ekonomi campuran tersebut mewarnai Sistem Ekonomi Indonesia dapat dilihat dari dua pendekatan yakni :pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah/negara dalam struktur perekonomian dan pendekatan historis yakni menelaah sejarah perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu..

### Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan (MPR RI, 1999). Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya (Mubyarto, 2002).

Pada Sistem Ekonomi Kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem Ekonomi Kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini: (1) Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat; (2) Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup; (3) Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (4) Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja; dan (5) Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat (Sari, 2011).

Sistem ekonomi kerakyatan sendiri utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak

menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang” (Pemerintah RI, 1945). Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera (Bhudianto, 2012).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kajian literatur. Penelitian ini untuk mengkaji suatu fenomena dengan mengandalkan studi literatur atau pustaka yang ada seperti artikel ilmiah, buku, dokumen dan lainnya. Selanjutnya data dianalisis dengan mencari benang merah tentang keterkaitan teori dengan topik yang dibahas.

### Teknik Analisis Data

Literatur ilmiah diambil dari artikel jurnal ilmiah yang diperoleh dari internet, dokumen seperti peraturan perundangan serta konferensi, serta dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya hasil dari literatur yang telah dikumpulkan tadi kemudian dikaji untuk menganalisis keterkaitan antara beragam literatur tersebut dengan teori yang ada serta dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya digambarkan dengan narasi dan disimpulkan apa yang menjadi temuan dari penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kawasan Timur Indonesia

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah sebuah kawasan yang relatif tertinggal. Kesenjangan pembangunan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) masih tampak cukup lebar dan cenderung permanen. Kinerja pembangunan dan pelayanan publik di KTI meskipun menunjukkan tren positif, namun belum mampu mendekati pada capaian pembangunan KBI. Dalam banyak hal, KTI identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan, keterisolasian, dan kemiskinan (Dachlan dan Suhab, 2014).

Indonesia Timur secara geografis dan kawasan pembangunan (menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993) terdiri dari Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Dari segi pembangunan, Indonesia Timur lebih tertinggal dibandingkan kawasan Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan). Seiring dengan semangat otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional, kawasan Indonesia Timur terus tumbuh.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) pernah menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950) dengan ibukota Makassar. Negara bagian tersebut dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946.

KTI terdiri dari 10 Provinsi utama yang dimotori oleh 10 kota utama yaitu Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Kota Ternate (Maluku Utara), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kota Mataram (NTB), Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kota Kupang (NTT), Kota Ambong (Maluku), Kota Jayapura (Papua), Kota Sorong (Papua Barat).

### Ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Jika kita menyebut 10 provinsi miskin di Indonesia, hampir semuanya berada di KTI. Posisi ini hampir tidak mengalami perubahan diametral dalam 30 tahun terakhir. Secara relatif, provinsi-provinsi tersebut bahkan

semakin tertinggal akibat provinsi-provinsi kaya bergerak lebih akseleratif. Maluku, sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia yang berada di KTI, memiliki pendapatan per kapita hanya sekitar seperlima dari rata-rata Nasional dan sepersepuluh dari Kalimantan Timur (merupakan provinsi dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi secara Nasional). Jurang kesenjangan ini terus memisahkan antara daerah kaya dengan daerah miskin tanpa menunjukkan tanda-tanda konvergensi.

Ketertinggalan KTI dikontribusi oleh banyak faktor, diantaranya, terbatasnya infrastruktur dasar yang kemudian menghambat arus investasi, rendahnya kualitas sumberdaya manusia akibat buruknya aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, buruknya konektivitas wilayah yang memicu melambungnya biaya logistik, dan kurangnya pelayanan dasar untuk pemenuhan hak-hak dasar yang berimbas terhadap rendahnya kualitas hidup. Kebijakan dan politik anggaran pemerintah (pusat) yang masih lebih bias ke KBI, juga dianggap sebagai faktor kunci yang menghambat kemajuan KTI (Dachlan & Suhab, 2014).

Institusi lokal dengan kapasitas rendah dan tidak akuntabel juga menyumbang bagi ketertinggalan KTI. Faktor kultural (seperti sikap hidup, budaya, dan lingkungan), meskipun masih bisa diperdebatkan, juga seringkali dianggap sebagai elemen dasar yang berkontribusi terhadap keterbelakangan KTI (Kawung, dkk, 2018). Fakta ini menjadi menarik karena sangat kontras dengan potensi kekayaan alam KTI yang berlimpah. Wilayah ini dianugerahi oleh alam berbagai jenis tambang seperti nikel, emas, tembaga, gas alam, dsb. Sebagai wilayah yang subur dan memiliki banyak pulau, KTI juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Keindahan alam dan kebudayaan eksotik yang tersebar di berbagai pelosok KTI juga menyimpan potensi pariwisata. Tapi kesemuanya ini tampaknya belum mampu mengangkat KTI ke level yang lebih signifikan (Kawung, dkk, 2018).

Secara keseluruhan, kontribusi KTI terhadap pembentukan PDB Nasional hanya sebesar 8,03 persen (Purnasihar, 2012). Jika data 2001 dijadikan sebagai referensi awal, maka tampak bahwa kontribusi KTI cenderung meningkat, dimana pada 2001 hanya sebesar 7,80 persen. Namun peningkatan ini tidak signifikan untuk memburu ketertinggalan KTI. Peningkatan ini juga tidak dikontribusi secara merata oleh seluruh wilayah di KTI. Peningkatan ini semata-mata dikontribusi oleh Pulau Sulawesi yang perannya bergerak naik dari 4,25 persen (2001) menjadi 4,98 persen (2012). Sebaliknya, peran Pulau Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua terhadap pembentukan PDB Nasional justru semakin melemah. Hal serupa juga terjadi pada Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sebaliknya, peran Pulau Jawa (termasuk Bali) terus membesar dan pada tahun 2012 telah mencapai 62,67 persen. Peningkatan peran Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi telah menekan peran pulau-pulau lainnya dalam pembentukan PDB Nasional. Kecenderungan ini akan menggeser sedikit isu kesenjangan antara KTI - KBI (setidaknya karena kesenjangan antara Sulawesi dengan Sumatera dan Kalimantan semakin membaik), akan tetapi semakin memperkuat isu kesenjangan antara Jawa dengan Luar-Jawa (Kawung, dkk, 2018). Kesenjangan antara sesama wilayah di KTI (terutama antara Sulawesi dengan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua), juga akan menjadi pola kesenjangan baru di masa depan, jika kecenderungan ini terus berlangsung (Dachlan & Suhab, 2014).

Rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang bekerja di KTI tampaknya terkonfirmasi oleh data kualitas sumberdaya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI sangat rendah, meskipun menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir. 11 dari 12 provinsi di KTI memperlihatkan angka IPM yang berada di bawah Nasional (Dachlan & Suhab, 2014). Bahkan dari 10 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, sembilan diantaranya berada di KTI. Peningkatan angka IPM di sejumlah provinsi tersebut juga bergerak lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masih menjadi tantangan utama pembangunan KTI di masa yang akan datang (Dachlan & Suhab, 2014).

Perekonomian Indonesia relatif terus tumbuh dengan baik selama lebih dari satu dekade terakhir dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tahunan mencapai 5,06% pada tahun 2014. Pencapaian ini juga didukung oleh tren penurunan persentase masyarakat miskin sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2014 (Hartati & Azwar, 2016)). Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Purnasihar (2012) ketimpangan pembangunan regional di Indonesia termasuk kedalam kondisi ketimpangan menengah dan cenderung meningkat setiap tahun. Ketimpangan pembangunan regional dipengaruhi signifikan oleh ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dana Perimbangan. Ketimpangan IPM merupakan ketimpangan dengan kategori tinggi. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD), investasi dan dana perimbangan termasuk kategori ketimpangan yang sedang. Secara umum

terjadi ketimpangan diantara sektor-sektor ekonomi dengan ketimpangan tertinggi sektor pertambangan. Sektor pertambangan juga penyebab ketimpangan sektoral diantara KBI dan KTI (Lawalata, 2015).

Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan pada kawasan ini adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sementara itu, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Sebagai akibatnya, koefisien Gini Ratio Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2002 sebesar 0,33 menjadi 0,408 pada tahun 2015 (Hartati & Azwar, 2016). Jika dilihat dari sebaran Gini Ratio pada seluruh provinsi di Indonesia, pada tahun 2013 distribusi pendapatan relatif merata di provinsi-provinsi di pulau Sumatra dan sebagian besar pulau Kalimantan. Sedangkan, provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi dan Papua, distribusi pendapatannya relatif timpang. Provinsi-provinsi dengan nilai Gini Ratio di atas Gini Ratio rata-rata nasional di antaranya : Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Khusus untuk provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia ini, Gini Ratio rata-rata lima tahun terakhir (2009-2013) pada provinsi Sulawesi Selatan menjadi tertinggi kedua (0.41) setelah provinsi Gorontalo dan Papua yang memiliki Gini Ratio yang sama (0.42) (Hartati & Azwar, 2016).

Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antarprovinsi juga semakin besar. Dengan begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan, permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan khususnya antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia telah muncul sejak lama. Pembangunan yang didominasi pada provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kawasan Barat Indonesia, membuat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal. Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi pada Kawasan Timur Indonesia (Hartati & Azwar, 2016). Hal ini didukung oleh Sholihah (2014 dalam Hartati & Azwar, 2016) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di Kawasan Barat Indonesia. Padahal menurut Todaro (2006, dalam Hartati & Azwar, 2016), masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi lebih kepada siapa yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (inklusif). Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Klasen (2010, dalam Hartati & Azwar, 2016) bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif itu berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro poor. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan jumlah kelompok yang “tidak diuntungkan” (marginal) dalam perekonomian.

### **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kawasan Timur Indonesia**

Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencakup 14 wilayah Propinsi yang terbentang dari pulau Kalimantan hingga pulau Papua, yaitu pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, kecuali pulau Bali. Dilihat dari aspek geografis luas wilayah KTI mencakup hampir 70% wilayah Indonesia, dan hanya didiami oleh kurang lebih 20% total penduduk Indonesia. Sementara, pulau Sumatera, pulau Jawa, dan pulau Bali dengan luas wilayah kurang lebih 30% dari wilayah Indonesia dihuni kurang lebih 80% total jumlah penduduk Indonesia.

Dengan wilayah yang luas tersebut dan ditambah dengan Melimpahnya kekayaan sumberdaya alam serta wilayah yang luas, sehingga ironis jika KTI harus menghadapi ketimpangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan rakyat di wilayah ini yang rendah jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia.

Potensi yang dapat dikembangkan di KTI sangat beragam mulai dari perekonomian, pertambangan, perkebunan, pariwisata, kelautan, kehutanan, industri kreatif dan masih banyak lagi. Bahkan ada pandangan dari para pihak terkait serta para pemikir di Indonesia yang menganggap bahwa masa depan Indonesia akan tergantung pada wilayah KTI ini.

Sistem ekonomi kerakyatan ini merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita para pendiri serta seluruh bangsa Indonesia yang cocok dengan keadaan wilayah dan rakyat di Indonesia. Hal ini juga karena rakyat Indonesia pada awalnya masih rendah kualitas dan motivasinya dalam mengelola perekonomian namun memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dan dibangkitkan agar memiliki kemampuan yang tinggi serta motivasi yang tinggi dalam pengelolaan perekonomian.

Untuk itu juga peran dari pemerintah serta para akademisi untuk meregulasi serta merumuskan beragam kebijakan dan juga beragam model ekonomi yang mampu memberdayakan perekonomian rakyat ini melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Ada beragam tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi kerakyatan khususnya juga menghadapi keragaman wilayah dan daerah di KTI seperti (Silooy, 2015): (1) Keterbatasan Pemerintah Daerah untuk ikut serta membiayai program-program pembangunan Kawasan Timiur Indonesia yaitu berkaitan dengan penggunaan DAU sebagian besar untuk kegiatan rutin dan beberapa daerah PAD juga terbatas; (2) Keterbatasan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan berimplikasi terhadap kurangnya perhatian terhadap daerah-daerah yang tertinggal sehingga daerah-daerah tersebut semakin tertinggal dari daerah lainnya; (3) Daerah-daerah atau wilayah potensi cepat tumbuh seperti KAPET kurang memperoleh perhatian khusus dalam penyediaan sarana dan prasarana; (4) Situasi yang kurang kondusif yaitu di satu sisi Pemerintah Daerah dengan kewenangan besar tidak didukung dengan kemampuan pembiayaan, sedangkan dipihak lain pemerintah pusat yang lebih konsen dengan wilayah atau kawasan cepat tumbuh terbatas kewenangan dan pembiayaannya.

Untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di KTI perlu diperhatikan beragam hal di bawah ini (Suprayoga, 2005).

Faktor pokok yang perlu diberikan perhatian lebih mendalam dalam memformulasikan strategi pengembangan KTI (Suprayoga, 2005): (a) adanya keanekaragaman situasi dan kondisi daerah-daerah di KTI yang memerlukan kebijaksanaan serta solusi pembangunan yang disesuaikan dengan kepentingan setempat (*local needs*); (b) perlunya pendekatan pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu dan menggunakan pendekatan perwilayahan; (c) perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan serta melibatkan peranserta masyarakat; serta (d) peningkatan serta pengembangan sektor pertanian yang tangguh untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat khususnya dalam bidang agribisnis dan agroindustri, serta penyediaan berbagai sarana dan prasarana lapangan kerja.

Memformulasikan strategi pengembangan KTI terdapat tiga pertimbangan pokok terhadap potensi dan peluang yang dimiliki KTI, yaitu (Suprayoga, 2005): (a) beberapa propinsi di KTI merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan, yang pada gilirannya dapat pula dikembangkan menjadi kawasan pusat-pusat pertumbuhan; (b) jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan luas wilayah, merupakan "katup pengaman" bagi program transmigrasi penduduk dari wilayah KBI yang relatif lebih padat; serta (c) adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek pemerataan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Strategi pengembangan wilayah KTI pada dasarnya merupakan strategi atau langkah-langkah kebijaksanaan yang bertahap, yakni mencakup tiga tingkatan strategi: mikro, meso, dan makro. Strategi tingkat mikro bertujuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar, membantu daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi, mendorong pengembangan potensi ekspor daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Strategi tingkat meso mengupayakan identifikasi keterkaitan fisik dan ekonomi antarpropinsi agar dapat diciptakan pusat-pusat pengembangan antarwilayah di kawasan yang bersangkutan. Sedangkan strategi tingkat makro lebih difokuskan pada pengembangan prasarana transportasi intra dan antarwilayah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pemanfaatan sumberdaya alam secara tepat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan peranserta sektor swasta, penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat termasuk peranserta aktif dari kalangan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di KTI.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di KTI harus dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip universal antara lain, mandiri, terbuka dan berkelanjutan. (1) Mandiri karena kegiatan ekonomi dilakukan dengan mempergunakan sumber daya lokal yang ada dan ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dalam hal ini kemandirian harus fokus betul-betul pada pemanfaatan sumber daya lokal serta sumber daya manusia di wilayah ini. Hal ini akan membawa dampak pada kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dan rakyat di wilayah KTI. (2) Terbuka karena harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berusaha dan mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini terbuka juga berarti bahwa semua masyarakat dapat berperan serta dan aktif menjadi pelaku ekonomi di wilayah

KTI. Aktivitas koruptif, kolusi dan nepotisme harus dihilangkan dalam ranah keterbukaan ini. Keterbukaan ini mencegah eksklusivitas dari penggunaan, pemanfaatan serta eksplorasi sumber-sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia. Disini dituntut peran pemerintah sebagai pihak yang menciptakan regulasi yang terbuka, transparan, akuntabel serta memberdayakan masyarakat lokal. (3) Berkelanjutan berarti kegiatan ekonomi dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan masa depan dan masyarakat yang lebih luas. Berkelanjutan ini terutama memperhatikan faktor sosial masyarakat dan juga lingkungan hidup di masa depan. Jika suatu eksplorasi ekonomi akan membawa dampak korban jiwa dari segi kesehatan dan kehidupan masyarakat maka akan terjadi yang disebabkan oleh limbah seperti limbah beracun hal ini sama saja dengan genosida di bidang lingkungan atau ekosida pada masyarakat dan lingkungan hidup serta ekosistem lingkungan. Untuk itu perhatian terhadap hal ini juga menjadi salah satu hal yang terutama bukan hanya sebagian saja yang bisa dihilangkan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan pada saat ini bukan lagi sebuah alternatif pilihan tetapi menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan ekonomi Indonesia yang mandiri seperti menjadi komitmen Pemerintahan Presiden Jokowi. Agenda pengembangan sistem ekonomi kerakyatan perlu mencakup lima hal berikut (Primahendra, 2016):

- (1) Pengembangan akses kepada sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi seperti modal, bahan baku, dan informasi harus dapat diakses oleh pelaku ekonomi rakyat. Mekanisme pemberian kredit dan penerapan bunga harus memastikan untuk tidak mendiskriminasi pelaku ekonomi rakyat. Pelaksanaan UU 6/2014 tentang desa dengan menyediakan cash transfer kepada desa merupakan wujud konkrit pengembangan akses masyarakat desa kepada sumber daya ekonomi, dalam hal ini finansial. Program pemerintah untuk membangun infrastruktur pada daerah terdepan, terisolir, dan terbelakang juga merupakan bentuk lain dari akses kepada sumber daya ekonomi seperti pasar.
- (2) Penataan kelembagaan. Terkait dengan penataan kelembagaan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan:
  - a) Perijinan yang diperlukan bagi pelaku ekonomi rakyat perlu diberikan dengan cepat, mudah, dan murah. Meskipun saat ini pemerintah gencar untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan, namun kebijakan ini masih menjadikan investor dari luar sebagai prioritas. Pelaku ekonomi rakyat masih berada di pinggiran. Perijinan yang seharusnya merupakan pengungkit bagi pengembangan usaha rakyat dalam praktik masih menjadi beban.
  - b) Perlu dipastikan agar sektor-sektor ekonomi yang menjadi bidang gerak ekonomi rakyat tidak dimasuki pelaku ekonomi besar/global. Sepuluh paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah berfokus untuk mendatangkan investor dari luar. Kebijakan tersebut belum diimbangi dengan upaya melindungi dan memberdayakan pelaku usaha ekonomi rakyat.
  - c) Pola kerja sama dan kolaborasi antar pelaku ekonomi rakyat dengan pelaku ekonomi besar/global perlu menjadi praktik bisnis dominan di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memiliki sarana dengan menjadikan semua BUMN/BUMD sebagai promotor kerja sama dengan pelaku ekonomi rakyat.
- (3) Pengembangan kapasitas. Pelaku ekonomi rakyat pada era global harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi global. Pengembangan kapasitas sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif menjadi suatu keharusan. Hal ini bukan persoalan mudah, sebagai contoh pengembangan kapasitas dari aparat desa untuk mampu memanfaatkan dana desa secara optimal masih menjadi tantangan. Terdapat lebih dari 74,000 desa, bila setiap desa harus dilatih kepala desa, sekretaris desa, dan kepala BPD (Badan Perwakilan Desa) berarti setidaknya 222,000 orang perlu mendapatkan pelatihan. Koordinasi antar lembaga pemerintah untuk melaksanakan hal ini masih menjadi isu yang tidak kunjung selesai.
- (4) Reorientasi pendidikan. Pendidikan kejuruan yang sesuai perlu menjadi prioritas pengembangan khususnya pada daerah-daerah dengan sumber daya tertentu. Sebagai contoh, daerah dengan potensi sumber daya perikanan perlu dikembangkan pendidikan kejuruan kelautan dan perikanan, sementara daerah dengan potensi hutan perlu mengembangkan pendidikan kejuruan industri kayu dan pengolahan hasil hutan non kayu (non timber forest product). Pada sisi lain, pendidikan umum khususnya pada disiplin ekonomi dan manajemen perlu mengembangkan pemahaman dan konsep ekonomi rakyat. Untuk itu studi, pemodelan dan teoritisasi ekonomi rakyat perlu dilakukan oleh para akademisi.
- (5) Atasi hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi kerakyatan terdiri dari praktik bisnis besar yang ilegal seperti ilegal fishing, ilegal logging, ilegal trading. Praktik bisnis ilegal membuat pelaku usaha besar mendapatkan bahan baku yang murah dan pada kasus perikanan menyebabkan nelayan kecil kehilangan lapangan pekerjaan. Hambatan ekonomi berikutnya adalah tata niaga yang bias sehingga menyebabkan harga jual pelaku ekonomi rakyat senantiasa tertekan, seperti komoditi pertanian dan perkebunan. Hambatan ekonomi

terakhir adalah berbagai pungutan dan retribusi yang dibebankan oleh otoritas lokal, seringkali tanpa ada dasar yang jelas.

## **Akselerasi Perekonomian dan Pariwisata Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Sulawesi Utara**

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah di KTI yang berada di ujung pulau Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina di utara serta berbatasan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di wilayah KTI. Provinsi ini saat ini mengandalkan sektor pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan, jasa serta pariwisata sebagai andalan sebagai motor penggerak ekonomi. Pengembangan ekonomi kerakyatan cocok di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan tingkat perekonomian dari rakyat serta masyarakat di wilayah ini yang tersebar di 12 kabupaten/kota serta 3 kabupaten kepulauan. Di tahun 2017 dan 2018 walaupun terjadi perlambatan ekonomi namun kawasan Sulawesi termasuk Sulawesi Utara menjadi motor utama penggerak perekonomian di KTI. Bahkan di pulau Sulawesi ekonomi tumbuh rata-rata di atas 8%. Untuk Sulawesi Utara sendiri pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 6,19%. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,7%, konstruksi sebesar 6,9%, perdagangan besar dan eceran sebesar 6,1%, serta industri pengolahan sebesar 1,1%.

Ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara ini antara lain berupa: (1) mengembangkan akses sumber daya ekonomi kepada masyarakat lokal di Sulawesi Utara seperti permodalan, bahan baku, serta informasi yang mudah diakses oleh para ekonomi kerakyatan hal ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota termasuk kabupaten kepulauan yang ada di Sulawesi Utara, hal ini agar seluruh masyarakat dapat mengakses dengan mudah sumber daya ekonomi yang dibutuhkan dan diperlukan dalam mengakselerasi ekonomi termasuk pariwisata di wilayah ini. (2) penataan kelembagaan di Sulawesi Utara dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan antara lain dengan perijinan yang cepat mudah dan murah di seluruh kabupaten/kota di Sulut khususnya dalam kemudahan berwirausaha (*ease of doing business*), kemudian pemerintah perlu meregulasi agar sektor ekonomi kerakyatan dapat dilindungi pelaku ekonomi yang besar/global sehingga ekonomi kerakyatan dapat berjalan dengan baik karena regulasi melindungi serta menciptakan ekosistem pertumbuhan bagi ekonomi kerakyatan sebagai contoh di Kabupaten Mitra di Sulawesi Utara yang melindungi rakyat lokal dengan melarang/tidak mengizinkan usaha ritel besar seperti Alfamart/Indomaret untuk beroperasi di wilayahnya; kemudian perlu adanya kerja sama antara pelaku ekonomi kerakyatan dengan pelaku ekonomi besar, dan ini perlu dimotori oleh pemerintah sebagai regulator dan juga peran dari akademisi. (3) pengembangan kapasitas dari pelaku usaha ekonomi kerakyatan antara lain updating dan upgrading serta scalling up dari usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat, seperti peningkatan dari usaha informal menjadi formal, dari usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan seterusnya; (4) reorientasi pendidikan dimana institusi-institusi pendidikan perlu menerapkan paradigma ekonomi kerakyatan di provinsi ini seperti sekolah-sekolah, SMK, perguruan tinggi negeri seperti Universitas Sam Ratulangi dan perguruan tinggi lainnya. (5) atasi hambatan ekonomi seperti mendapatkan barang atau produk yang tidak fair atau illegal, tata niaga yang monopolistik, serta pungutan atau retribusi yang tidak jelas, yang harus dihilangkan dari wilayah ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Akselerasi perekonomian dan pariwisata di Kawasan Timur Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara dapat dipicu oleh pengembangan sistem ekonomi kerakyatan di wilayah ini.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Utara dapat dilakukan melalui: pengembangan akses kepada sumber daya ekonomi, penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas usaha, reorientasi pendidikan, serta mengatasi hambatan ekonomi.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah

1. Pemerintah sebagai regulator harus memperhatikan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Utara dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan mendukung sistem ekonomi kerakyatan.

2. Akademisi dan institusi pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara perlu menciptakan terobosan-terobosan dalam mendorong ekonomi kerakyatan dalam mengakselerasi sektor ekonomi dan pariwisata di wilayah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhudianto, W. (2012). Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian. *Transformasi*, 15(22), Hal. 1–9. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114782&val=5263>, diakses tanggal 01 November 2017.
- Dachlan, D., & Suhab, S. (2014). *Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dalam Konteks Kekinian Indonesia*. Makassar: P3KM Unhass Press.
- Dumairy. (2005). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Farida, A. S. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hartati, I., & Azwar. (2016, Desember 28). Pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia: Sudah Inklusifkah? [Blog]. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/23374-pertumbuhan-di-kawasan-timur-indonesia-sudah-inklusifkah>, diakses tanggal 10 Februari 2018.
- Kawung, G. M. V., Mintardjo, C. M. O., Rompas, W. I., & Kojo, C. (2018). *Kemudahan Memulai, dan Melembagakan Bisnis UKM di Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Kajian pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara)*. Manado: Unsrat Press.
- Lawalata, M. (2015, Maret 7). Ketimpangan Pembangunan KBI Dan KTI [Blog]. <http://jikti.bakti.or.id/updates/ketimpangan-pembangunan-kbi-dan-kti>. diakses tanggal 5 November 2017
- MPR RI. (1999). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Mubyarto. (2002). Makalah untuk Konperensi Nasional Pengembangan Sosial Ekonomi Indonesia. Dipresentasikan pada Konferensi Nasional Pengembangan Sosial Ekonomi, Yogyakarta.
- Pemerintah RI. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Primahendra, R. (2016, Maret 18). Membangun Ekonomi Kerakyatan. <https://www.linkedin.com/pulse/membangun-ekonomi-kerakyatan-riza-primahendra>, diakses 17 September 2018.
- Purnasihar. (2012). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Regional dan Sektoral di Indonesia* (TESIS). Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Sari, A. N. (2011). *Sistem Ekonomi Kerakyatan Melalui wadah Gerakan koperasi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Silooy, M. (2015, Maret 7). Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. <http://jikti.bakti.or.id/updates/percepatan-pembangunan-kawasan-timur-indonesia>, diakses 17 Februari 2018.
- Subandi. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno. (1964). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi.
- Suprayoga. (2005). Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. <http://suprayoga.tripod.com/CIDESKTI.html>, diakses 17 Maret 2018.